

**Optimalisasi Fungsi Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el)  
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan  
Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi  
Kependudukan**

**(Studi Pada Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Blitar)**

Firdaus Nugroho Bintang, Agus Yulianto, S.H., M.H. Dr. Shinta

Hadiyantina.S.H., M.H.

Fakultas Hukum Universitas Brawijaya

EMAIL: [firdausnugrohobintang@yahoo.co.id](mailto:firdausnugrohobintang@yahoo.co.id)

**Abstraksi**

Pentingnya identitas dalam mendukung tercapainya tertib administrasi kependudukan di kota Blitar setelah lahirnya Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sangat kompleks fungsinya. Melalui Nomor Induk Kependudukan (NIK) yang bersifat tunggal, Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el) menjadi salah satu media yang digunakan pemerintah untuk menciptakan database kependudukan yang baik, sehingga penduduk berhak mendapat manfaat dari fungsi KTP-el yang dimilikinya dengan media *e-reader* maupun tanpa *e-reader* khususnya manfaat terkait pelayanan publik sebagaimana yang diatur dalam pasal 64 ayat (4).

Kata Kunci: Optimalisasi, Fungsi, Kartu Tanda Penduduk Elektronik, Administrasi Kependudukan.

**Abstract**

Important of identity for support the good demography administration in Blitar City after existence Act Number 24 of 2013 About Alteration of Act Number 23 of 2006 About Demography Administration very complex function. From Main Number of Demography with just one characteristic, Electronic Identity Card of Demography be one of media who have government to creat

good demography database, with the result that inhabitant have the right to get benefit from function of Electronic Identity Card of Demography who have with e-reader or non e-reader, the specific benefit about public service in the same manner as arrange in article 64 clause (4).

Keywords: Optimalization, Function, Electronic Identity Card of Demography, Demography Administration.

## A. LATAR BELAKANG PERMASALAHAN

Secara klasik, unsur negara terdiri dari wilayah, rakyat atau bangsa dan pemerintahan yang berdaulat.<sup>1</sup> Secara modern unsur negara dianggap ada 4 (empat) yaitu wilayah, rakyat atau bangsa, pemerintah berdaulat dan pengakuan dari negara lain.<sup>2</sup> Dalam suatu proses terbentuknya negara, rakyat merupakan salah satu unsur terbentuknya suatu negara disamping wilayah, pemerintahan yang berdaulat, dan pengakuan dari negara lain. Setiap negara mempunyai rakyat, dari rakyat dapat terbentuk penduduk, pengertian penduduk adalah orang yang bertempat tinggal dalam wilayah suatu negara dan tunduk pada kekuasaan negara,<sup>3</sup> sehingga penduduk harus menempati wilayah dan mentaati peraturan negara dimana ia tinggal.

Kota Blitar sebagai salah satu kota yang mengoptimalkan fungsi Kartu Tanda Penduduk Elektronik, untuk keperluan fasilitas publik. Dasar pelaksanaan atas optimalisasi fungsi Kartu Tanda Penduduk Elektronik saat ini adalah Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagai perundang-undangan yang mengganti peraturan sebelumnya. Undang-undang ini memberikan kepastian hukum bagi penduduk untuk mendapat manfaat pelayanan publik dari adanya KTP-*e* yang dimilikinya sebagaimana diatur dalam pasal 64 ayat (4) yang berbunyi “Untuk menyelenggarakan semua pelayanan

<sup>1</sup> Mirriam Budiardjo, *Dasar-dasar Ilmu Politik*, Gramedia, 1993, hlm. 41-45.

<sup>2</sup> Budiyo, *Dasar-dasar Ilmu Tata Negara*, Erlangga, 2000, Hlm. 19.

<sup>3</sup> C.S.T. Kansil, (dkk), *Hukum Tata Negara Republik Indonesia 1 (Edisi Revisi)*, Rineka Cipta, Jakarta, 2000, hlm 216

publik sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Pemerintah melakukan integrasi nomor identitas yang telah ada dan digunakan untuk pelayanan publik paling lambat 5 (lima) tahun sejak Undang-Undang ini disahkan”.

Jumlah penduduk Kota Blitar hingga akhir tahun 2013 (per 31 Desember 2013) tercatat sebanyak 152.713, terdiri atas 76.177 penduduk laki-laki dan 76.536 penduduk perempuan. Dari data tersebut tercatat 111.834 wajib KTP di kota Blitar, terdiri dari 54.998 wajib KTP laki-laki dan 56.836 wajib KTP perempuan tersebar di 3 kecamatan dan 21 kelurahan namun hanya 98.335 penduduk yang memiliki KTP, berikut perinciannya:<sup>4</sup>Data jumlah penduduk yang telah melakukan perekaman *KTP-el* di Kota Blitar adalah 50.555 laki-laki dan 52.605 perempuan, dengan total jumlah penduduk yang telah melakukan perekaman *KTP-el* adalah sebanyak 103.160 orang.<sup>5</sup>

Berdasar Kartu Tanda Penduduk Elektronik di Kota Blitar maka Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Blitar sebagai instansi pelaksana wajib mengupayakan terwujudnya *KTP-el* sebagai media bagi setiap penduduk untuk mendapat kemudahan terkait optimalisasi dari fungsi Kartu Tanda Penduduk Elektronik yang menjamin penduduk mendapat kemudahan dari adanya *KTP-el* tersebut dan dijamin oleh Undang-Undang No 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan.<sup>6</sup>

Berdasarkan uraian di atas peneliti tertarik untuk melakukan penelitian mengenai Optimalisasi Fungsi Kartu Tanda Penduduk Elektronik (*KTP-el*) Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan Pada Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Blitar.

---

<sup>4</sup> Database SIAK Pelayanan Dispenduk Capil Kota Blitar per 31 Desember 2013, Jumlah Penduduk yang Memiliki KTP Kota Blitar Tahun 2013. Didapat pada 30 Oktober 2014.

<sup>5</sup> Database SIAK Pelayanan Dispenduk Capil Kota Blitar per 31 Desember 2013, Jumlah Wajib KTP Kota Blitar Tahun 2013 Berdasarkan Kepemilikan Kartu Tanda Penduduk, didapat pada 30 Oktober 2014.

<sup>6</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475.

## B. PERUMUSAN MASALAH

1. Bagaimana optimalisasi fungsi Kartu Tanda Penduduk Elektronik di Kota Blitar berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan?
2. Bagaimana upaya yang dilakukan dan hambatan yang dialami Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Blitar dalam mengoptimalkan fungsi Kartu Tanda Penduduk Elektronik?

## C. PEMBAHASAN

### A. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian berdasarkan uraian maka penelitian hukum ini termasuk kedalam kategori penelitian hukum empiris, Penelitian hukum empiris menggunakan study kasus hukum empiris berupa perilaku hukum masyarakat<sup>7</sup> karena penelitian hukum ini bermaksud untuk memperoleh dan menganalisis data tentang optimalisasi fungsi kartu tanda penduduk elektronik (KTP-el) berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan terhadap Pentingnya Sarana dan fasilitas umum bagi penduduk Kota Blitar.

2. Pendekatan penelitian untuk meneliti permasalahan serta mendekati pokok permasalahan dalam meneliti Optimalisasi Fungsi Kartu Tanda Penduduk Elektronik di Kota Blitar, pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis-sosiologis (*social-legal research*) yaitu pendekatan dari sisi hukum untuk memahami permasalahan. berdasar peraturan perundang-undangan yang sudah ada yaitu Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan.<sup>8</sup>

3. Lokasi penelitian ini adalah bertempat di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Blitar karena sebagai salah satu kota di Jawa Timur yang

---

<sup>7</sup> Abdulkadir Muhammad, Hukum dan Penelitian Hukum, cetakan 1 Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2004, hlm 40.

<sup>8</sup> Bambang Sunggono, Metode Penelitian, PT raja Grafindo Persada, Jakarta, 2013, hlm. 43.

secara garis besar telah rampung dalam pelaksanaan pembuatan KTP-*el* serta alat yang digunakan dalam pembuatan Kartu Tanda Penduduk Elektronik di Kota Blitar sudah sesuai prosedur hingga dipinjam ke ibukota Jawa Timur, Surabaya.

4. Sumber data, pertama Data primer berupa pengalaman, pemahaman, persepsi, pendapat, harapan dan lain-lain dari subyek penelitian data ini didapat secara langsung dari dengan menggunakan metode wawancara secara langsung kepada responden sebagai sumber utama yaitu kepada pegawai Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Blitar khususnya pada sekretaris, Kasi Mobilitas penduduk, dan Kasi Pengolahan data serta Pelapor atas KTP-*el* di Kota Blitar. Kedua data sekunder terdiri dari arsip, laporan, notulensi, risalah, perjanjian, leaflet, brosur dokumen-dokumen di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Blitar, Perundang-undangan, asas-asas hukum dan pendapat hukum dalam literatur, jurnal, hasil penelitian, dokumen surat kabar, internet, dan majalah ilmiah.

5. Populasi adalah seluruh objek atau individu/unit dari seluruh gejala kegiatan yang akan diteliti. Populasi pada penelitian ini ditujukan kepada:

1. Seluruh pegawai atau staf di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Daerah Kota Blitar sebagai instansi penyelenggara sekaligus sebagai tempat penelitian dan
2. Seluruh pelapor atau wajib KTP-*el* sebagai subyek dan pemilik yang berhak mendapat pelayanan dari adanya KTP*el*.

Jenis sampel yang digunakan adalah purposif sampel, yaitu pengambilan sampel dari penelitian dilakukan untuk tujuan tertentu saja yang mewakili populasi dan mempunyai hubungan erat dengan ciri-ciri populasi, dalam melakukan pemilihan sampel, peneliti menggunakan teknik *random sample* yakni dalam memilih responden yang dibutuhkan maka penulis melakukannya secara acak menggunakan wawancara secara langsung. Maka sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Sebagian pegawai Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Blitar dengan bidang utama Sekretaris Dinas, serta;

2. Sebagian pelapor KTP-*el* yang dipilih secara acak oleh peneliti.

6. Teknik analisis data pada penelitian ini peneliti menyiapkan daftar pertanyaan yang sistematis dan terperinci untuk memperoleh data yang dibutuhkan dari responden, Proses analisis data dimulai dengan menelaah seluruh data yang telah diperoleh dari berbagai sumber, kemudian dilakukan reduksi data dengan cara membuat abstraksi, setelah itu menyusun data dalam satuan-satuan yang kemudian dikategorikan, tahap selanjutnya mengadakan pemeriksaan keabsahan data, setelah tahap ini selesai dilakukan penafsiran data.

B.Optimalisasi fungsi Kartu Tanda Penduduk Elektronik di Kota Blitar berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan

Dalam deskripsi tentang Hukum Administrasi Negara dan tempatnya dalam ilmu hukum, W.F. Prins juga berpaling pada C. van Vollenhoven yang pada tahun 1919 mengumumkan hasil studinya tentang *Thorbecke en het Administratief Recht*. Pada tahun 1927 van Vollenhoven memberikan cirri hukum administrasi negara sebagai berikut:<sup>9</sup>

“untuk sebagian hukum administrasi negara merupakan pembatasan terhadap kebebasan pemerintah, jadi merupakan jaminan bagi mereka, yang harus taat kepada pemerintah; akan tetapi untuk sebagian besar hukum administrasi mengandung arti pula, bahwa mereka yang harus taat kepada pemerintah menjadi dibebani pelbagai kewajiban yang tegas bagaimana dan sampai dimana batasnya, dan berhubungan dengan itu, berarti juga, bahwa wewenang pemerintah menjadi luas dan tegas” (W.F. Prins, h. 7).

Menurut aliran Boserupian kemajuan teknologi pada penduduk terkait pelayanan publik merupakan tekanan penduduk yang justru dapat mempercepat inovasi teknologi, dan masyarakat cenderung berusaha mencari teknologi baru atau mengadaptasi teknologi yang ada pada lingkungan baru, aliran Boserupian berfokus pada hubungan antara tiga faktor, yaitu penduduk, lingkungan, dan teknologi. Peneliti menyimpulkan aliran ini berlaku hingga sekarang sebagai

---

<sup>9</sup> Philipus M. Hadjon, dkk, Pengantar Hukum Administrasi Indonesia *Introduction to the Indonesian Administrative Law*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 2008, hlm. 25.

contoh dari perkembangan teknologi adalah perubahan identitas penduduk semula KTP konvensional menjadi *KTP-el*, tekanan penduduk dapat mempercepat inovasi teknologi, hal ini merupakan tindakan mencari teknologi baru dengan mengadaptasi teknologi yang sudah ada sebelumnya pada lingkungan pemerintahan yang baru yaitu pemerintahan berbasis *e-government* dengan artian pemerintahan berbasis elektronik.

Dalam Ilmu Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara, istilah “kekuasaan” dan “wewenang” terkait erat dengan pelaksanaan fungsi pemerintah.<sup>10</sup> satuan urusan pemerintah yang dibebankan kepada organ tertentu untuk dilaksanakan, dan wewenang adalah pelaksanaan teknik urusan yang dimaksud.<sup>11</sup>

Pemerintah bertindak melaksanakan kewajiban dan kewenangannya berdasar azas-azas yang menjadi acuan dalam pelaksanaan pemerintahan di Indonesia acuan tersebut adalah berdasar Azas-azas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB) supaya pemerintah tidak menyalahgunakan kewenangannya untuk kepentingan tertentu yang merugikan negara maupun masyarakat. Adapun Azas-azas Umum Pemerintahan yang Baik ini dapat dikategorikan kedalam tigabelas azas, yaitu:<sup>12</sup>

1. Azas kepastian hukum (*principle of legal security*);
2. Azas keseimbangan (*principle of proportionality*);
3. Azas kesamaan dalam mengambil keputusan pangreh (*principle of equality*);
4. Azas bertindak cermat (*principle of carefulness*);
5. Azas motivasi untuk setiap keputusan pangreh (*principle of motivation*);
6. Azas jangan mencampur-adukkan kewenangan (*principle of non misuse of competence*);
7. Azas permainan yang layak (*principle of fair play*);
8. Azas keadilan atau kewajaran (*principle of reasonable or prohibition of arbitrariness*);
9. Azas menanggapi pengharapan yang wajar (*principle of meeting raised expectation*);

<sup>10</sup> Indroharto, *Usaha Memahami Undang-Undang Tentang Peradilan Tata Usaha Negara Buku I, Beberapa Pengertian Dasar Peradilan Tata Usaha Negara*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1996,

<sup>11</sup> Lubis M. Solly, *Pergeseran Garis Politik dan Perundang-undangan Mengenai Pemerintah Daerah*, Bandung, 2002, hlm. 56.

<sup>12</sup> Koentjoro Purbopranoto, *Beberapa Catatan Hukum Tata Pemerintahan dan Peradilan Administrasi Negara*, Alumni, Bandung, 1978, hlm. 29, 30.

10. Azas meniadakan akibat suatu keputusan yang batal (*principle of undoing the consequences of an annuled decision*);
11. Azas perlindungan atas pandangan (cara) hidup pribadi (*principle of protecting the personal way of life*);
12. Azas kebijaksanaan (*sapientia*);
13. Azas penyelenggaraan kepentingan umum (*principle of public service*).

Ditinjau dari segi Azas-azas Umum Pemerintahan yang Baik di Indonesia (*Principle of public service*), dimana dalam hal ini adalah kepentingan umum yang didapat dari adanya Kartu Tanda Penduduk Elektronik yang diupayakan oleh pemerintah khususnya Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Blitar. Azas Penyelenggaraan Kepentingan Umum menjamin pelaksanaan atas program *KTP-el* sebagai upaya mewujudkan tertib administrasi bidang kependudukan. Pasal 64 ayat (4) menjelaskan bahwa pemerintah wajib melaksanakan terwujudnya pelayanan publik dengan menggunakan Nomor Induk Kependudukan (NIK) sebagai medianya, dengan demikian masyarakat memiliki kesempatan untuk mendapatkan pelayanan publik secara menyeluruh dengan memiliki Nomor Identitas Kependudukan (NIK) sebagai nomor identitas diri sebagai Warga Negara Indonesia yang sah. Kartu Tanpa Penduduk Elektronik bersifat tunggal sebab terdapat sidik jari dan *chip* di dalamnya sehingga tidak bisa digandakan.

Berdasar wawancara dengan sekretaris Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Blitar Kotatertkait fungsi dan manfaat *KTP-el* di kota Blitar adalah sebagai berikut:

“*KTP-el* merupakan sistem informasi dengan NIK, manusia butuh identitas dahulu bisa identitas ganda dengan adanya SIAK muncul *KTP-el* satu NIK untuk 1 orang kalau ada yang ganda akan ketahuan, dengan *KTP-el* berarti sudah melengkapi diri dengan administrasi kependudukan yang betul. *KTP-el* berfungsi dan berlaku di seluruh Indonesia, *KTP-el* *inonline*, jadi pihak-pihak lain baik itu perbankan, lembaga yang membutuhkan seperti kepolisian sudah ada alat pendeteksi bisa dinikmati fungsinya. Di Depdagri keika *KTP-el* ditempelkan pada alat pembacanya secara otomatis muncul nama saya, nah sekarang itu buku tamu nyaris tidak ada elektronik semua, begitu *KTP-el* saya dimasukkan ke *e-reader* tadi data saya langsung termuat masuk disana tidak harus menulis di buku lagi, itu berarti sudah menghemat waktu, menghemat biaya artinya kita sudah tidak perlu membeli buku, bolpoin, dan waktupun lebih cepat. Manakala saya di hotel diberi



satu kunci elektronik untuk dua orang, kalau teman saya keluar satunya tidak bisa masuk, andai dia ditinggal di hotel untuk menghidupkan listrik KTP-*el* bisa sebagai pengganti, berarti di dalamnya sudah terpantau ini memang tamu di hotel tersebut. Dalam bidang perbankan harusnya juga sudah melakukan itu sebab kaitannya langsung dengan keuangan jadi sangat penting dan vital fungsinya KTP-*el* itu, Itu merupakan kemajuan soal KTP-*el*”

Berikut Penampang KTP-*el*.<sup>13</sup>



**Gambar 1: Penampang dan Struktur KTP-*el***

Terdiri dari Material: PET-G, dan terdapat 7 layer. Dengan perincian:

1. 65 Micron: Clear Layer
2. 120 Micron: Foreground and Security Printing
3. 100 Micron: Infity Core
4. 330 Micron: Infity Core
5. 100 Micron: Infity Core
6. 120 Micron: Background and Security Printing
7. 65 Micron: Personalization Layer

Kartu Tanda Penduduk Elektronik bersifat tunggal sebab terdapat sidik jari dan *chip* di dalamnya sehingga tidak bisa digandakan, berikut manfaat Biometrik dan Chip pada KTP-*el*.<sup>14</sup>

<sup>13</sup> Data booklet didapat dari Pengolahan Data Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Blitar terkait struktur KTP Elektronik (E-KTP), hlm 15.

<sup>14</sup> Data booklet didapat dari Pengolahan Data Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Blitar terkait manfaat KTP Elektronik (E-KTP), hlm 13.



**Gambar 2: Manfaat Biometrik (Sidik Jari) dan Chip pada KTP-el**

Manfaat Biometrik (Sidik Jari):

1. Sebagai identifikasi jati diri, yaitu data yang termuat dalam dokumen menunjukkan identitas diri penduduk bersangkutan secara cegaakurat dan cepat;
2. Sebagai autentifikasi diri, yaitu sebagai alat memastikan dokumen sebagai milik orang tersebut (mencegah pemalsuan dokumen, sekaligus mencegah dokumen ganda, dan mempunyai Sistem Pengamanan Data independen) dan sebagai password bagi individu penduduk.

Manfaat CHIP:

1. Sebagai alat penyimpanan data elektronik penduduk yang diperlukan, termasuk data biometrik;
2. Data yang termuat dalam Chip dapat dibaca secara elektronik dengan alat tertentu (*reader*) dimana saja;
3. Dilengkapi dengan pengaman data didalam Chip itu sendiri;
4. Dapat berfungsi untuk berbagai kebutuhan (multiguna) dengan Chip dimaksud (ID Card, ATM, Access Card) dan relatif mudah diintegrasikan dengan sistem lain

Manfaat dari adanya KTP-el bagi pemiliknya adalah sebagai berikut:

1. Kemudahan Berpergian.

Dengan memiliki KTP-el penduduk tidak perlu risau apabila berpergian di daerah lain, sebab penggunaan KTP-el dapat digunakan di seluruh daerah di Indonesia sehingga memudahkan pemiliknya untuk berpergian di seluruh Indonesia.

2. Data Statistik Kependudukan yang Akurat.

Kartu Tanda Penduduk Elektronik mendukung terciptanya data statistik kependudukan yang akurat, penggunaan KTP-el sebagai data

diri/identitas tunggal atau tidak dapat digandakan mendukung terciptanya data statistik kependudukan dan pencatatan jumlah penduduk Indonesia secara tepat dan akurat, sebab seorang hanya memiliki 1 (satu) Kartu Tanda Penduduk Elektronik saja; seperti contoh pada kasus AirAsia salah satu korban adalah penduduk Blitar, KTP-*el* yang ada disaku korban dapat lebih cepat proses identifikasi korban AirAsia. Selain itu data penunjang keluarga korban yang tidak dimungkinkan mendatangi posko dapat diwakilkan dengan KTP-*el*.

### 3. Akses Pelayanan Publik.

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil menunjukan beberapa bidang yang dapat digunakan sebagai akses pelayanan publik bagi pemilik KTP-*el* diantaranya: Pajak, Perbankan, Bisnis, Kepolisian, dan lain-lain.

### 4. Perencanaan Pembangunan Nasional yang Tepat

Berdasar pasal 58 ayat (4 huruf b) Yang dimaksud dengan "pemanfaatan perencanaan pembangunan", antara lain untuk perencanaan pembangunan nasional, perencanaan pendidikan, perencanaan kesehatan, perencanaan tenaga kerja, dan/atau pengentasan masyarakat dari kemiskinan.

### 5. Mempersempit Tindak Terorisme Internasional/Domestik

Umumnya terorisme memiliki lebih dari satu identitas diri untuk menyamarkan identitas aslinya, terkait adanya Kartu Tanda Penduduk elektronik diharapkan pemalsuan identitas seperti ini dapat dihindarkan, dengan demikian lebih mudah untuk mengetahui jati diri teroris yang sesungguhnya.

### 6. Menghindari Pekerjaan Ilegal/Imigran Ilegal

Seperti halnya terorisme umumnya pekerjaan ilegal/imigran ilegal menyamarkan identitas aslinya atau dimungkinkan tidak memiliki identitas resmi atas jati dirinya, sehingga dalam hal ini KTP-*el* sangat bermanfaat untuk menentukan identitas atau status kependudukan seseorang sehingga dapat menyatakan seseorang tersebut sebagai imigran ilegal bila tidak memiliki identitas dan ketentuan yang berlaku.

### 7. Meminimalisir Penyalahgunaan Dokumen Penduduk

Sifat KTP-*el* yang tunggal dan dapat dideteksi oleh *e-reader* memudahkan dalam penerbitan dokumen sebab hal ini dokumen penduduk akan lebih mudah dan penyalahgunaan dokumen penduduk dapat dikurangi.

#### 8. Status Kependudukan Seseorang

Keberadaan *KTP-el* menjadikan status kependudukan seseorang menjadi sah dan diakui oleh negara, sebabketentuannya telah diatur oleh Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi kependudukan.

#### 9. Citra/Eksistensi Negara

Manfaat dari program *KTP-el* menjadikan citra negara Indonesia menjadi lebih dikenal dalam bidang kependudukan, Menteri Dalam Negeri dalam situs resmi *KTP-el* mengungkapkan bahwa Kartu Tanda Penduduk Elektronik (*e-KTP*) yang diterapkan di Indonesia memiliki keunggulan dibandingkan dengan *e-KTP* yang diterapkan di china dan india. *KTP-el* Indonesia lebih komprehensif, di Cina Kartu identitas elektronik (*e-IC*) tidak dilengkapi dengan biometrik atau rekaman sidik jari. Di sana, *e-IC* hanya dilengkapi dengan chip yang berisi data perorangan yang terbatas. Sedangkan di india, sistem yang digunakan untuk pengelolaan data kependudukan adalah sistem UID (Unique Identification Data), sedangkan di Indonesia namanya NIK (Nomor Induk Kependudukan). UID diterbitkan melalui pendaftaran pada 68 titik pelayanan, sedangkan program *KTP-el* di Indonesia dilaksanakan di lebih dari 6.214 kecamatan. Dengan demikian, *e-KTP* yang diterapkan di Indonesia merupakan gabungan *e-ID* china dan UID india, karena *e-KTP* dilengkapi dengan biometrik dan chip.<sup>15</sup>

#### 10. Demokrasi (Pemilu/Pemilukada)

Kartu Tanda Penduduk Elektronik dapat dijadikan media penunjang terlaksananya Pemilu/Pemilukada, hal ini dikarenakan dengan adanya *KTP-el* dapat digunakan untuk *Electronic voting (e-voting)* atau kartu suara elektronik bagi penduduk Indonesia yang tidak bisa hadir secara langsung ke Tempat Pemilihan Suara (TPS), umumnya bagi penduduk Indonesia yang berada di luar luar negeri. Proses pendaftaran Daftar Pemilih Tetap (DPT) lebih mudah dan lebih cepat, sebab setelah didata tanpa perlu lagi mengisi borang atau form pemilihan yang relatif banyak *KTP-el* sudah menjadi bukti bahwa pemilik telah menjadi DPT.

#### 11. Keamanan Negara

Manfaat *KTP-el* dapat digunakan untuk menjamin keamanan negara dengan carameminimalisir terorisme dan pekerjaan illegal dari menyamarkan

---

<sup>15</sup>Subuki Sahrianto, Tinjauan Yuridis Pelaksanaan Kewenangan Pemerintah Kota Makassar Pada Penyelenggaraan Elektronik Kartu Tanda Penduduk (*E-KTP*), hal 7-8.

identitas asli dan tindakan kriminal lainnya mempermudah aparat dalam melacak pelaku kriminal menjadikan *KTP-el* sebagai sarana mencapai keamanan negara

Fungsi Kartu Tanda Penduduk Elektronik di Kota Blitar berdasar wawancara dengan Kasi Mobilitas Penduduk Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Blitar diantaranya digunakan sebagai:<sup>16</sup>

“Kartu Tanda Penduduk Elektronik sebagai master atau syarat utama dalam mendaftar sebagai peserta BPJS, persyaratan ini dapat dilihat pada seluruh Puskesmas di Kota Blitar termasuk Rumah Sakit Umum Daerah Kota Blitar Mardi Waluyo salah satunya tanpa perlu menunggu lama pada verifikasi BPJS yang awalnya beberapa hari bisa menjadi beberapa belas menit saja. Bidang perbankan dapat digunakan sebagai syarat pendaftaran asuransi maupun perbankan seperti meminjam uang yang tentu syaratnya adalah identitas diri yang sah dan tunggal tidak digandakan, selain itu *KTPel* di Kota Blitar juga dapat digunakan sebagai penanganan kasus pembunuhan untuk identifikasi hanya perlu sekitar 2 jam, selain itu dapat digunakan sebagai pelacak kejahatan khususnya terorisme sebab sudah tidak bisa lagi seorang memiliki identitas ganda.”

Manfaat *KTP* elektronik seperti yang dilansir dalam booklet Penerapan NIK dan *KTP* Elektronik Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Daerah Kota Blitar adalah sebagai berikut:

1. Untuk mencegah dan menutup peluang adanya *KTP* ganda dan *KTP* palsu, sehingga memberikan rasa aman dan kepastian hukum bagi penduduk;
2. Untuk mendukung terwujudnya database kependudukan yang akurat, sehingga Data Pemilih dalam pemilu dan Pemilu kada yang selama ini sering bermasalah tidak akan terjadi lagi, dan semua Warga Negara Indonesia yang berhak memilih, terjamin hak pilihnya;
3. Dapat mendukung peningkatan keamanan negara sebagai dampak positif dari tertutupnya peluang *KTP* ganda dan *KTP* palsu, dimana selama ini para pelaku kriminal termasuk teroris, TKI Ilegal dan perdagangan orang, umumnya menggunakan *KTP* ganda dan *KTP* palsu;
4. *KTP* elektronik merupakan *KTP* nasional yang sudah memenuhi ketentuan peraturan berlaku secara nasional. Sehingga *KTP-el*

---

<sup>16</sup> Data prasurvey, wawancara dengan Kasi Mobilitas Penduduk, tanggal 30 Oktober 2014, di kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Blitar



*reader* sangat beragam, misal seperti penggunaan KTP-*el* sebagai kartu suara pada Komisi Pemilihan Umum (KPU) pada Pemilihan Umum (Pemilu) yang dilaksanakan secara online atau *e-voting*, Perbankan sebagai alat transfer uang dan menjamin tidak adanya rekening ganda, Masyarakat sebagai identitas tunggal yang mempermudah pemilik tanpa perlu fotokopi identitas langsung dapat didata secara otomatis dengan *e-reader*, Sosialhal ini dapat berlaku diantaranya terkait pendaftaran dan peminjaman buku pada perpustakaan dan pelayanan sebelum memasuki stasiun kereta api tanpa perlu mengantri untuk didata manual, Polri sebagai alat mempermudah mengungkap identitas pelaku kriminalitas, Tenaga Kerja dan Transmigrasi sebagai alat meminimalisir pekerja ilegal.

Disamping fungsi dengan *e-reader* KTP-*el* juga dapat digunakan dalam bidang Kesehatan sebagai syarat pengurusan Asuransi Kesehatan (Askes), dan pengurusan syarat mendaftar sebagai peserta Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial (BPJS) yang mewajibkan KTP-*el* sebagai syarat utama dalam mendaftar BPJS. Data terbaru yang dikeluarkan BPJS per Januari 2015 BPJS memberikan layanan gratis terhadap pesertanya untuk cek *Pap Smear* dan IVA, hal ini memberikan fasilitas kesehatan gratis bagi perempuan untuk mengecek penyakit seputar alat reproduksinya seperti kista, serviks, dan lain-lain, bidang Polri sebagai syarat utama mengajukan ujian mendapat lesensi Mengemudi (SIM), dan lain sebagainya. Keseluruhan fasilitas yang bisa didapat pada instansi pemerintah tersebut merupakan manfaat dari KTP-*el* yang tanpa menggunakan *e-reader* atau alat pembaca *chip* sudah dapat dirasakan manfaatnya oleh pemilik KTP-*el*.

## **B. Upaya yang dilakukan dan Hambatan yang dialami Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Blitar dalam mengoptimalkan fungsi Kartu Tanda Penduduk Elektronik**

Upaya pemerintah untuk mensukseskan program KTP-*el* termasuk percepatannya pada Tahun 2014, telah melakukan koordinasi antar instansi dan antar daerah, membentuk sistem, pedoman, dan standar, serta melakukan pembinaan, pembimbingan, supervisi, pemantauan, evaluasi dan konsultasi kepada pemerintah daerah kabupaten/kota. Lebih lanjut masih diperlukan langkah-langkah yang perlu dilakukan agar diperoleh kemudahan dan kelancaran

dalam pelayanan publik di bidang administrasi kependudukan, di antaranya adalah menciptakan suatu sistem yang disebut dengan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) yang telah tersambung secara *online* dengan semua kabupaten/kota dan kecamatan. Upaya Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Blitar turut memudahkan proses identifikasi salah satu penduduknya yang menjadi korban kecelakaan pesawat AirAsia QZ 8501 dengan memanfaatkan KTP-*el* sebagai alat yang telah menyimpan data sidik jari pada korban maupun keluarga korban guna kepentingan identifikasi tim *Disaster Victim Identification* (DVI). Peneliti menyimpulkan upaya yang dilakukan oleh Dinas Kependudukan dan catatan Sipil Kota Blitar sangat perlu diapresiasi, mulai upaya menjalin kerjasama, tanggap pada penduduknya dan peduli pada pelapor KTP-*el* guna mendapat fasilitas publik di Kota Blitar merupakan bukti penyelenggaraan dinas dalam mengoptimalkan fungsi KTP-*el* di Kota Blitar.

Hambatan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Blitar dalam mengoptimalkan KTP-*el* pertama terkait pendaftaran dengan rata-rata 100-150 orangpendaftar KTP-*el*perhari,keesiapandinas dalam hal ini perlu dipertimbangkan adanya tenaga ahli yang secara profesional dapat mengorganisir waktu supaya lebih singkat, namun banyaknya petugas banyak dimutasimenjadikan permasalahan internal dinas.Kurangnya kesadaran masyarakat, dengan mendaftar lewat calo membuat kerugian tersendiri bagi Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Blitar Seharusnya pelapor memenuhi undangan dengan mendatangi tempat pelayanan KTP Elektronik (tidak dapat diwakilkan).Dalam mengoptimalkan fungsi KTP-*el* selain pelaksanaan tatacara mendaftar juga pada upaya menerapkan fungsi KTP-*el*, kurangnya alat pendukung seperti *e-reader* membuat kurang maksimalnya fungsi KTP-*el*di Kota Blitar.

## **Penutup**

### **A. Kesimpulan**

1. Optimalisasi fungsi Kartu Tanda Penduduk Elektronik di Kota Blitar berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan



Kemudahan fasilitas publik yang didapat dari adanya fungsi KTP-*el* berbasis *chip* yang dapat terbaca pada *e-reader* sangat beragam, misal seperti penggunaan KTP-*el* sebagai kartu suara pada Komisi Pemilihan Umum (KPU) pada Pemilihan Umum (Pemilu) yang dilaksanakan secara online atau *e-voting*, Perbankan sebagai alat transfer uang dan menjamin tidak adanya rekening ganda, Masyarakat sebagai identitas tunggal yang mempermudah pemilik tanpa perlu fotokopi identitas langsung dapat didata secara otomatis dengan *e-reader*, Sosialhal ini dapat berlaku diantaranya terkait pendaftaran dan peminjaman buku pada perpustakaan dan pelayanan sebelum memasuki stasiun kereta api tanpa perlu mengantri untuk didata manual, Polri sebagai alat mempermudah mengungkap identitas pelaku kriminalitas, Tenaga Kerja dan Transmigrasi sebagai alat meminimalisir pekerja ilegal.

Fungsi KTP-*el* tanpa *e-reader* pada bidang Kesehatan sebagai syarat pengurusan Asuransi Kesehatan (Askes), dan pengurusan syarat mendaftar sebagai peserta Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial (BPJS) yang mewajibkan KTP-*el* sebagai syarat utama dalam mendaftar BPJS. Data terbaru yang dikeluarkan BPJS per Januari 2015 BPJS memberikan layanan gratis terhadap pesertanya untuk cek *Pap Smear* dan IVA, hal ini memberikan fasilitas kesehatan gratis bagi perempuan untuk mengecek penyakit seputar alat reproduksinya seperti kista, serviks, dan lain-lain, bidang Polri sebagai syarat utama mengajukan ujian mendapat lesensi Mengemudi (SIM), dan lain sebagainya. Keseluruhan fasilitas yang bisa didapat pada instansi pemerintah tersebut merupakan manfaat dari KTP-*el* yang tanpa menggunakan *e-reader* atau alat pembaca *chip* sudah dapat dirasakan manfaatnya oleh pemilik KTP-*el*.

2. Upaya yang dilakukan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil kota Blitar perlu untuk diapresiasi, sebab untuk mengatasi permasalahan tersebut dinas memaksimalkan pada kesiapan pegawai dalam melayani penduduk dengan waktu rata-rata kurang dari 10 menit registrasi pendaftaran KTP-*el* sudah dapat dimasukkan dalam pendataan. Upaya penyuluhan fungsi KTP-*el* dilakukan pada masyarakat mulai dari PKK, RT, RW, Kelurahan, Kecamatan, dan kerjasama dengan instansi lain di kota Blitar hingga kerjasama dengan Dinas Kependudukan

dan Catatan Sipil Kota Surabaya menjadi kegiatan mewujudkan optimalnya fungsi KTP-*el* untuk kebutuhan penduduk Kota Blitar

3. Hambatan yang dialami Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Blitar dalam mengoptimalkan fungsi Kartu Tanda Penduduk Elektronik. Hambatan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Blitar terbagi menjadi dua kendala, pertama hambatan internal terkait pegawai ahli yang dimutasi, dan jumlah pegawai yang terbatas untuk melayani penduduk rata-rata 100-150 orang per-hari, kedua hambatan eksternal yaitu terkait kesadaran masyarakat atas pentingnya fungsi KTP-*el*, dan jumlah instansi di Kota Blitar masih sedikit yang menggunakan media *e-reader* sebagai alat mengoptimalkan KTP-*el*.

#### B. Saran

1. Pemerintah Kota Blitar dan instansi pelaksana KTP-*el* segera melaksanakan terwujudnya KTP-*el* berbasis *e-reader* secara menyeluruh supaya penduduk Kota Blitar dapat merasakan kemudahan mendapat pelayanan publik dari optimalnya fungsi KTP-*el* sehingga terwujud tertib administrasi di Kota Blitar.
2. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Blitar perlu manajemen terkait jumlah dan pegawai ahli dalam mengoptimalkan KTP-*el* sekaligus juga mengupayakan pemaksimalan peralatan penunjang optimalnya fungsi KTP-*el* seperti *e-reader* di Kota Blitar.

#### Daftar Pustaka

- Abdulkadir Muhammad, Hukum dan Penelitian Hukum, cetakan 1 Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2004, hlm 40.
- Bambang Sunggono, Metode Penelitian, PT raja Grafindo Persada, Jakarta, 2013, hlm. 43.
- Budiyanto, Dasar-dasar Ilmu Tata Negara, Erlangga, 2000, Hlm. 19.
- C.S.T. Kansil, (dkk), *Hukum Tata Negara Republik Indonesia 1 (Edisi Revisi)*, Rineka Cipta, Jakarta, 2000, hlm 216

- Indroharto, *Usaha Memahami Undang-Undang Tentang Peradilan Tata Usaha Negara Buku I, Beberapa Pengertian Dasar Peradilan Tata Usaha Negara*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1996,
- Koentjoro Purbopranoto, *Beberapa Catatan Hukum Tata Pemerintahan dan Peradilan Administrasi Negara*, Alumni, Bandung, 1978, hlm. 29, 30.
- Lubis M. Solly, *Pergeseran Garis Politik dan Perundang-undangan Mengenai Pemerintah Daerah*, Bandung, 2002, hlm. 56.
- Miriam Budiardjo, *Dasar-dasar Ilmu Politik*, , Gramedia, 1993, hlm. 41-45.
- Philipus M. Hadjon, dkk, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia Introduction to the Indonesian Administrative Law*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 2008, hlm. 25.
- Ratminto & Atunarsih, *Manajemen Pelayanan*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2005, hlm. 21.

### **Skripsi:**

- Subuki Sahrianto, *Tinjauan Yuridis Pelaksanaan Kewenangan Pemerintah Kota Makassar Pada Penyelenggaraan Elektronik Kartu Tanda Penduduk (E-KTP)*, hal 7-8.

### **Data**

- Database SIAK Pelayanan Dispenduk Capil Kota Blitar per 31 Desember 2013, Jumlah Penduduk yang Memiliki KTP Kota Blitar Tahun 2013. Didapat pada 30 Oktober 2014.
- Database SIAK Pelayanan Dispenduk Capil Kota Blitar per 31 Desember 2013, Jumlah Wajib KTP Kota Blitar Tahun 2013 Berdasarkan Kepemilikan Kartu Tanda Penduduk, didapat pada 30 Oktober 2014.
- Data prasurvey, wawancara dengan Kasi Mobilitas Penduduk, tanggal 30 Oktober 2014, di kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Blitar
- Data Survey wawancara dengan Sekertaris, Sugeng Wiyono, tanggal 16 januari 2015, di kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Blitar, pukul 11.10.

### **Internet**

- bahan\_sosialisasi-ktp-e\_ditjen-dukcapilkemendagri\_10mei2011, diakses pada Minggu 18 Januari 2015, pukul 16.00 WIB.